

masyarakat terhadap narkoba. Dengan demikian, strategi dari aspek evaluasi dan pengendalian yang diterapkan oleh BNN Kabupaten Banyumas tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga mampu menghasilkan capaian yang signifikan. Melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan penyesuaian berkelanjutan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan efektivitas program serta meningkatkan kualitas layanan dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sidik, J., & Meiwanda, G. (2022), yang menunjukkan bahwa BNN Kabupaten Pekanbaru menerapkan strategi penanggulangan narkoba secara kolaboratif dan berbasis data, dengan pemetaan wilayah rawan, evaluasi berkala, serta penggunaan indikator ketahanan sosial keluarga dan remaja. Strategi ini juga mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui kerja sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba telah berjalan cukup baik melalui berbagai aspek strategis. Pada aspek pengamatan lingkungan, Secara internal, menunjukkan struktur organisasi yang efektif, budaya kerja yang positif, dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kekuatan utama, meskipun kekurangan personel masih menjadi tantangan. Di sisi eksternal, dukungan stakeholder lokal sangat membantu, tetapi masih ada hambatan berupa stigma masyarakat dan kendala geografis. Upaya kolaboratif dan edukatif terus diperkuat untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam aspek perumusan strategi BNN Kabupaten Banyumas telah merumuskan dengan pendekatan terintegrasi dan berbasis data melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang mencakup pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Program-program seperti Desa Bersinar dan Intervensi Berbasis Masyarakat menunjukkan keberlanjutan dan kesesuaian dengan karakteristik lokal. Penetapan kebijakan didasarkan pada data kerawanan dan kebutuhan masyarakat yang dianalisis secara rutin untuk menjaga

relevansi strategi. Pada aspek implementasi strategi, Implementasi strategi dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data. Identifikasi wilayah rawan menjadi dasar penyusunan program, dan semua seksi di BNN Kabupaten Banyumas terlibat lintas bidang. Pelaksanaan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional yang disahkan oleh BNN Provinsi. Kerja sama formal (PKS/MoU) dan informal dengan berbagai pihak, termasuk Polri dan Balai Latihan Kerja, memperkuat efektivitas pelaksanaan serta dukungan reintegrasi sosial pasca-rehabilitasi. Sedangkan dalam aspek evaluasi dan pengendalian, dilakukan secara sistematis melalui monitoring mingguan hingga tahunan, serta didukung oleh sistem e-Monev dan e-Planning. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas juga menggunakan indeks DEKTARI dan DEKTARA sebagai alat ukur formal serta rehabilitasi dilakukan dengan mengukur perubahan kualitas hidup klien sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan capaian melebihi target, namun strategi tetap ditingkatkan secara adaptif untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan keberhasilan dalam menanggulangi narkoba di wilayah Banyumas.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah kurangnya jumlah personil di beberapa bidang, seperti Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, serta Rehabilitasi. Kekurangan ini berdampak pada keterbatasan jangkauan kegiatan dan efektivitas pelaksanaan program yang membutuhkan tenaga operasional yang cukup, terutama untuk kegiatan lapangan yang bersifat melibatkan banyak peserta.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar BNN Kabupaten Banyumas mengupayakan penambahan jumlah personil di bidang-bidang tersebut. Penambahan personil diperlukan agar kegiatan seperti penyuluhan, kegiatan tes urine, serta program intervensi masyarakat dapat terlaksana secara lebih optimal, merata, dan berkelanjutan. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan jumlah sumber

daya manusia, penulis juga menyarankan agar BNN Kabupaten Banyumas secara konsisten melibatkan penggiat anti narkoba dalam setiap kegiatan yang membutuhkan banyak personil. Penggiat anti narkoba, yang berasal dari kalangan masyarakat, ataupun tokoh lokal yang sudah dibina, dapat menjadi mitra penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan. Mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, kampanye kreatif, serta dukungan teknis dalam pelaksanaan event atau program yang berskala besar.

